

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini dikarenakan UMKM mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja yang ada di Indonesia sehingga memperkecil tingkat pengangguran, UMKM juga diartikan sebagai bisnis berskala kecil dan bisa dijalankan oleh setiap orang, baik itu rumah tangga hingga badan usaha. UMKM memiliki ciri yaitu meliputi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Tidak heran bila kegiatan perekonomian Indonesia sebagian besar dijalankan oleh UMKM sebagaimana yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja di Indonesia.

Penyerapan jumlah tenaga kerja adalah banyaknya lapangan tenaga kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Salah satu sektor usaha yang mampu berkontribusi meningkatkan jumlah tenaga kerja ialah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena UMKM mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding Usaha Besar (UB) dan UMKM juga memiliki keunggulan dibidang inovasi teknologi yang sudah maju dalam pengembangan suatu produk yang memiliki peluang usaha yang menguntungkan bagi masyarakat banyak. Tidak hanya itu sektor UMKM juga terbukti secara umum dapat menggunakan barang-barang sederhana dengan harga relatif murah akan tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan UMKM dapat merubah

tingkat pembangunan ekonomi di Indonesia untuk memajukan perekonomian yang ada. UMKM juga dijadikan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia, dikarenakan UMKM memiliki potensial yang tinggi dalam kontribusinya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga pemerintah begitu tekun dalam mengupayakan pertumbuhan UMKM.

Penyerapan tenaga kerja UMKM dapat dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi yang terjadi pada perekonomian disuatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat diantaranya ialah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitasi inflasi yang terjadi.

Menurut Mimbar (2016:333) pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh tingkat pengangguran yang semakin menurun. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya maka semakin rendah tingkat pengangguran dan semakin tinggi tingkat penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan Pertumbuhan ekonomi suatu negara mencerminkan peningkatan terhadap pendapatan (GDP), peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dikarenakan peningkatan GDP akan sejalan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Maka, pertumbuhan ekonomi sangat berperan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Upah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dikarenakan tingkat upah minimum yang ditetapkan tinggi akan membuat rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dikarenakan para pelaku usaha mikro

enggannya menambah jumlah tenaga kerja dengan upah yang tinggi dan lebih memilih menggunakan tenaga mesin atau teknologi, sebaliknya jika tingkat upah minimum yang ditetapkan rendah akan membuat meningkatnya penyerapan tenaga kerja dikarenakan dengan upah minimum yang rendah membuat para pelaku usaha mikro ingin meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dapat meningkatkan jumlah produksi.

Lube (2021:28) menyatakan bahwa dengan adanya kenaikan upah minimum, diprediksi akan menyebabkan peningkatan jam kerja dari pekerja yang tetap bekerja (biasanya pekerja dengan keahlian tinggi) yang mengakibatkan penurunan jumlah pekerja terampil rendah. Jam kerja dari pekerja dengan keahlian tinggi akan bertambah akibat kenaikan upah minimum, hal ini dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mengkompensasi pengurangan jumlah pekerja akibat kenaikan upah minimum, kondisi ini dikenal sebagai efek substitusi antara jam kerja dengan pekerja.

Adapun data penyerapan tenaga kerja sektor UMKM, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Jumlah Tenaga Kerja Sektor UMKM di Indonesia Tahun 2005-2020.

Tahun	Inflasi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Upah Minimum (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja UMKM (Jiwa)
2005	17,10	5,69	507.697	83.586.616
2006	6,60	5,50	602.702	87.909.598
2007	6,59	6,35	672.480	90.491.930
2008	11,06	6,01	745.709	94.024.278
2009	2,78	4,63	841.530	95.211.332
2010	6,96	6,22	908.824	96.193.623
2011	3,79	6,49	988.824	98.238.913
2012	4,30	6,26	1.088.903	101.722.458
2013	8,38	5,73	1.296.908	107.657.509
2014	8,36	5,01	1.584.391	114.144.082
2015	3,35	4,88	1.790.342	123.229.386
2016	3,02	5,03	1.997.819	112.828.610
2017	3,61	5,07	2.079.324	116.431.224
2018	3,13	5,17	2.264.679	116.978.631
2019	2,72	5,02	2.455.662	119.562.843
2020	1,68	-2,07	2.672.371	117.021.936

Sumber: BPS (diolah), Kementerian Koperasi dan UKM, Upah Minimum Rata-rata provinsi, Berbagai Sumber.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa lapangan kerja mengalami peningkatan dari tahun 2005 hingga tahun 2019. Total tenaga kerja

pada tahun 2005 sebesar 83.586.616 jiwa dan menjadi 119.562.843 jiwa pada tahun 2019. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah pengusaha dan UMKM di Indonesia sehingga meningkatnya jumlah tenaga kerja UMKM. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 117.021.936 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh munculnya wabah COVID-19. Munculnya wabah ini ditandai dengan terjadinya penurunan penjualan dan adanya masalah terkait pembiayaan upah tenaga kerja sehingga berdampak terhadap penurunan tenaga kerja. Masalah ini semakin sering terjadi ketika dikaitkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa inflasi dari tahun 2005 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi dimana nilai tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 17,10 naik sebesar 10,71% dari tahun 2004 dan menurun sebesar 10,50% pada tahun 2006. Persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,68%. Hal ini disebabkan karena harga barang tidak stabil sehingga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja UMKM di Indonesia.

Apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan seperti terlihat pada tabel. Perusahaan berusaha akan menambah jumlah output atau produksi karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang mana masih dapat dijangkau oleh produsen. Keinginan perusahaan untuk menambah output tentu juga dibarengi oleh penambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Pada kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya akan meningkatkan

penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional.

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005 sampai 2019 ke arah positif. Dari sepanjang tahun 2005 sampai 2019 bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 6,49% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 4,63%. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4,88% dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Menurut Aghnia (2015:1) “goyahnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lesu pada kuartal II 2015. Rendahnya daya beli masyarakat telah membuat penurunan produktivitas para pengusaha kecil dan menengah yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional”. Kemudian memasuki tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan ke arah negatif sebesar -2,07% hal ini diakibatkan lantaran merebaknya virus pandemi covid-19 dan adanya himbauan pembatasan pergerakan masyarakat dari Pemerintah yang berdampak pada banyak perusahaan dan unit usaha memangkas pemakaian tenaga kerja secara terpaksa. Sementara upah minimum meningkat pada saat itu. Akibat dari fenomena ini adalah daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Kembali membaik atau meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diakibatkan karena adanya peningkatan daya beli masyarakat yang mengakibatkan permintaan terhadap produk UMKM

baik dalam negeri maupun luar negeri. Meningkatnya jumlah tenaga kerja sektor UMKM juga diakibatkan karena pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaku UMKM memperoleh modal sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa upah minimum antara tahun 2005 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Upah minimum naik menjadi Rp.2.672.371 pada tahun 2020 dari level terendah sebelumnya yaitu Rp.507.697 tahun 2005. Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan pasal 30 berbunyi: upah diartikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. sehingga pemerintah terus melakukan kebijakan didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan perbaikan terhadap upah minimum.

Berdasarkan pemaparan diatas sesuai dengan fenomena yang dibahas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM di Indonesia Tahun 2005-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM di Indonesia tahun 2005-2020?
2. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan pekerja pada sektor UMKM di Indonesia tahun 2005-2020?
3. Bagaimanakah pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM di Indonesia tahun 2005-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia tahun 2005-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia tahun 2005-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia tahun 2005-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah, membantu dalam mengambil kebijakan untuk memajukan pembangunan ekonomi melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM sebagai realisasi pengurangan permasalahan pengangguran yang terjadi di Indonesia.
3. Sebagai acuan bagi mahasiswa dan koleksi perpustakaan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan penelitian dalam bidang penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pondasi perekonomian negara berkembang terdiri dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dikarenakan UMKM berperan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja serta berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan UKM (2008:3) tentang UMKM dijelaskan sebagai: “Kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional”.

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. (Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2008:2).

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dibedakan berdasarkan kriteria kekayaan bersih dari masing-masing usaha, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2008:4-5).

2.2 Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara didunia adalah inflasi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan definisi dari inflasi memiliki pandangan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mereka memiliki konsep yang sama. Inflasi merupakan suatu keadaan dimana meningkatnya harga-harga pada umumnya atau penurunan nilai mata uang.

Inflasi merupakan kecenderungan harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. (Boediono, 2022:161).

Jadi inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat kenaikan harga pada barang secara umum dan terus-menerus yang mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Syarat kenaikan harga-harga dari satu barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain. Juga kecendrungan menaiknya harga yang terus menerus yang diakibatkan oleh pergantian musim, seperti Natal, Lebaran dan Tahun Baru serta hari-hari besar lainnya atau terjadi sekali saja dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan tidak dinamakan inflasi.

Menurut Anamathofani (2019:7) inflasi yang terjadi pada perekonomian disuatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitasi inflasi yang terjadi. Apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan, perusahaan seharusnya berusaha akan menambah jumlah output atau produksi karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang mana masih dapat dijangkau oleh produsen. Keinginan perusahaan untuk menambah output tentu juga dibarengi oleh penambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Pada kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan pada akhirnya mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional.

2.2.1 Teori Inflasi

1. Teori Kuantitas

Teori ini dikenal teori Kaum Monetaris (*monetaris models*) yang menekankan pada peranan jumlah uang yang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi.

2. Teori Keynes

Menurut teori ini inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Dalam teorinya, Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonomisnya. Proses perebutan rezeki antar golongan masyarakat masih menimbulkan permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik. Jika hal ini terus terjadi maka selama itu pula proses inflasi akan berlangsung.

2.2.2 Jenis-jenis Inflasi

Dalam teori ekonomi, Inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dalam pengelompokan tertentu, sebagai berikut:

a. Penggolongan inflasi atas derajat parah tidaknya inflasi dibedakan menjadi empat

macam, yaitu:

- 1) inflasi ringan dibawah 10%
- 2) inflasi sedang antara 10% - 30%
- 3) inflasi tinggi antara 30% - 100%
- 4) hyperinflation diatas 100%

b. Penggolongan inflasi didasarkan pada penyebabnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Demand pull inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan agregat permintaan masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi pada barang. Inflasi yang seperti ini terjadi disebabkan oleh adanya suatu kenaikan permintaan pada

beberapa jenis barang. Dalam hal ini, untuk permintaan masyarakat akan meningkatkan secara agregat atau aggregate demand. Adanya peningkatan permintaan ini bisa terjadi karena terjadi peningkatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah, terjadi kenaikan permintaan terhadap barang yang diekspor dan terjadi kenaikan permintaan barang untuk kebutuhan pihak swasta. Peningkatan permintaan yang muncul di masyarakat atau aggregate demand ini dapat mengakibatkan harga-harga menjadi naik yang disebabkan oleh adanya penawaran tetap.

- 2) *Cost push inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan karena penurunan penawaran agregat sehingga bergesernya kurva agregat penawaran ke arah kiri atas. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya agregat penawaran adalah meningkatnya biaya produksi di pasar faktor produksi sehingga menaikkan harga komoditas di pasar komoditas. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi.

c. Penggolongan inflasi menurut asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Domestic Inflation*, yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik disektor riil maupun disektor moneter dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat. Inflasi tarikan permintaan dapat terjadi akibat permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi tersebut kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment.

- 2) *Imported Inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh karena adanya kenaikan harga-harga komoditi diluar negeri (dinegara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan). Inflasi desakan biaya dapat terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (*input*) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (*output*) yang dihasilkan ikut naik.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.3.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Masalah perekonomian jangka panjang adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gambaran kasar tentang ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya menggunakan tingkat PDB yang dicapai oleh negara tersebut. Dengan bertambahnya output yang dihasilkan oleh suatu negara juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Adapun laju atau kecepatan terjadinya perluasan ditentukan oleh tingkat investasi di bidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern. Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja. Kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional, maka peningkatan ini akan selalu diikuti oleh pertambahan dalam kesempatan kerja. Pertambahan barang modal sebagai akibat dari investasi akan menambah kapasitas produksi di masa yang akan datang, perkembangan ini akan menstimulus perubahan produksi nasional dan kesempatan kerja.

2.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Model Pertumbuhan Output dan Kesempatan Kerja

Dalam model pertumbuhan ini yang menjadi fokus utamanya adalah menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan *Gross National Product* (GNP), sehingga model ini mengisyaratkan bahwa dengan memaksimalkan pertumbuhan GNP nya suatu negara dapat memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. Model ekonomi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan investasi, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja adalah model makro output-kesempatan kerja (*output-employment macro model*).

Menurut Todaro (1998:297) dalam model pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa “Model makro output-kesempatan kerja (*output-employment macro model*) yang berfokus kepada hubungan-hubungan antara akumulasi modal, pertumbuhan output industri, dan penciptaan lapangan kerja”.

Perhatian utama dari model pertumbuhan ini adalah pada kebijakan untuk meningkatkan output nasional melalui akumulasi modal dan akhirnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2. Teori Adam Smith

Teori Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan menaikkan tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi bertambah tinggi. perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan diantara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meninggikan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan

semakin terpacu dengan adanya pembagian kerja antar pelaku ekonomi dan akhirnya akan menambah kesempatan kerja akibat spesialisasi kerja yang mendorong perkembangan teknologi, karena untuk mengoperasikan teknologi tersebut dibutuhkan tenaga kerja manusia.

3. Hukum Okun

Arthur Okun membuat konsep output potensial yang menunjukkan hubungan antara output dan penganggur. Mankiw dalam Widdyantoro (2013:41-42) menyatakan bahwa:

“Salah satu konsekuensi Hukum Okun adalah PDB riil harus tumbuh secepat PDB potensial untuk menjaga agar tingkat pengangguran tidak meningkat. PDB harus tetap melaju untuk menjaga tingkat pengangguran stabil. Jika pengangguran ingin diturunkan, PDB sebenarnya harus tumbuh lebih cepat dari PDB potensial”.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan modal akan meningkatkan pendapatan nasional yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Modal yang dimiliki pelaku usaha dapat digunakan untuk membeli barang-barang seperti mesin dan perlengkapan produksi untuk meningkatkan hasil output serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena barang-barang modal tersebut membutuhkan tenaga manusia untuk mengoperasikannya.

2.4 Upah Minimum

Teori Upah menurut Adam Smith yaitu Teori Neo Klasik yang menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah disini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut terhadap pengusaha. Upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja (produktivitas) yang diberikan oleh tenaga

kerja, artinya pada teori ini dapat diketahui bahwa teori neo klasik didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil faktor produksi. Upah minimum di Indonesia diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 (2013:3) tentang upah minimum pasal 1 berbunyi:

“Definisi upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman”.

Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi.
2. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 (2003:4) tentang ketenagakerjaan pasal 30 berbunyi:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Dapat dijelaskan bahwa upah merupakan pembayaran berupa uang, barang yang diberikan kepada tenaga kerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, terdapat syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Menurut Cahyaningtyas (2019:2) faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat upah antara lain:

1. Biaya Hidup

Perbedaan tingkat biaya hidup antar daerah dapat menyebabkan perbedaan kompensasi karyawan. Biaya hidup tinggi juga melahirkan tuntutan pekerja atas upah yang lebih tinggi pula. Untung menunjang biaya hidup yang layak, perusahaan yang mempekerjakan karyawan di daerah dengan tingkat biaya hidup tinggi umumnya memberikan gaji pokok.

2. Regulasi Pemerintah

Undang-undang ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah pengupahan melarang perusahaan membayar upah karyawan lebih rendah dari upah minimum provinsi (UMP) dan upah kota/kabupaten (UMK).

3. Kompensasi Perusahaan Lain

Nilai kompensasi juga dipengaruhi oleh upah diperusahaan lain yang bergerak disektor usaha yang sama. Karena itu, ini akan menjadi dasar menentukan seberapa besar perusahaan akan membayar imbalan karyawan.

4. Kemampuan Perusahaan

Perusahaan berskala besar atau punya reputasi bagus tertentu bisa memberikan kompensasi yang besar bagi karyawannya.

5. Jenis Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Perusahaan merupakan sebuah bentuk organisasi bisnis yang menerapkan sistem pembagian kerja yang jelas dan terukur jenis pekerjaan dan tanggung jawab.

6. Peranan Serikat Buruh

Kompensasi karyawan juga dipengaruhi oleh peran serikat buruh, terutama dalam perjanjian kerja bersama. Tuntutan atas tunjangan tertentu dari serikat buruh memungkinkan perusahaan memenuhinya.

Menurut Sukirno (2009:364-366) faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah, antara lain:

1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam sesuatu jenis pekerjaan yang sangat besar perannya dalam menentukan upah disuatu jenis pekerjaan. Di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, upah akan cenderung untuk mencapai tingkat yang rendah. Sebaliknya di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar, maka upah akan cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi.
2. Perbedaan corak pekerjaan meliputi pekerjaan yang ringan dan sangat mudah dikerjakan. Akan tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang besar, dan ada pula pekerjaan yang harus dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan.
3. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan dalam suatu jenis pekerjaan adalah berbeda.
4. Pertimbangan bukan keuangan mempunyai peranan yang cukup penting pada waktu seseorang memilih pekerjaan.
5. Mobilitas tenaga kerja pemisalan ini berarti: kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka tenaga kerja akan mengalir ke pasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi.
6. Faktor geografis merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidaksempurnaan mobilitas tenaga kerja.
7. Faktor Institusional.

2.5 Tenaga Kerja

2.5.1 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja yaitu 15 tahun ke atas untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja disuatu negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang tergolong dalam tenaga kerja yaitu penduduk yang telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 - 64 tahun. Dalam hal ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Bagi sebuah negara, tenaga kerja adalah salah satu komponen bagi penggerak sistem ekonomi yang paling berpengaruh. Hal ini karena keterlibatan tenaga kerja secara langsung pada sebuah proses produksi barang atau jasa yang mampu menggerakkan perekonomian di Indonesia. Maka penting bagi tenaga kerja untuk mendapat hak perlindungan baik dari pemerintah maupun perusahaan tertentu.

2.5.2 Teori Tenaga Kerja

1. Teori Mazhab Klasik

Pandangan para ekonom yang tergabung dalam Mazhab Klasik percaya bahwa perekonomian pada umumnya akan selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Pandangan ini didasarkan kepada dua keyakinan yaitu:

- a. Fleksibilitas suku bunga dan tingkat harga akan menyebabkan keseimbangan di antara penawaran agregat dan permintaan agregat tercapai pada penggunaan tenaga kerja penuh.

- b. Fleksibilitas tingkat upah mewujudkan keadaan dimana permintaan dan penawaran tenaga kerja mencapai keseimbangan pada penggunaan tenaga kerja penuh (Sukirno, 2016:70).

2. Teori Keynes

Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang menjadi wujud perekonomian. Menurut Sadono Sukirno pandangan ini mengacu kepada dua hal berikut: “(i) faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi dan suku bunga dalam perekonomian. (ii) sifat-sifat perkaitan diantara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha” (Sukirno, 2016:80).

3. Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Smith memandang bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu faktor produksi penting. Karena, segala sumber daya alam yang ada dapat dikelola secara efektif dan efisien oleh sumber daya manusia. Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh.

Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang itu. Maka di dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan

permintaan. Dengan demikian, penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan. (Sukirno, 2016:70).

2.5.3 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi.

Menurut Sudarsono dalam kutipan Widdyantoro (2013:18) menyatakan bahwa:

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu, permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain: naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta adalah lebih ditujukan pada kuantitas dan banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu.

Disamping itu permintaan akan tenaga kerja akan bertambah besar karena peningkatan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan atau instansi tertentu, hal ini disebabkan permintaan konsumen yang meningkat terhadap suatu produk, maka produsen cenderung akan meningkatkan produksi barangnya karena permintaan bertambah besar.

2.5.4 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak serta bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkan oleh pekerja. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Keputusan individu dapat diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang yang diberikan perusahaan terhadap

tenaga kerja, sedangkan kendala yang dihadapi individu adalah tingkat upah dan waktu tenaga kerja.

Dalam suatu perekonomian yang luas, tingkat upah yang tinggi akan mendorong semakin banyak orang untuk bekerja. Dengan demikian, tenaga kerja yang tadinya tidak ingin bekerja karena upah yang diberikan rendah, maka tenaga kerja tersebut akan bersedia untuk bekerja dan mencari pekerjaan karena tingkat upah yang tinggi.

2.5.5 Penyerapan Tenaga Kerja UMKM

Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha tertentu. Penyerapan tenaga kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Pasar tenaga kerja di Indonesia dapat dibedakan atas sektor formal dan informal. Sektor formal mencakup perusahaan yang mempunyai status hukum, pengakuan dan izin resmi serta umumnya berskala besar. Sebaliknya sektor informal merupakan sektor dengan kegiatan usaha umumnya sederhana, skala usaha relatif kecil, umumnya sektor informal tidak berbadan hukum. Berdasarkan penjelasan dan ciri-ciri dari sektor usaha UMKM sebelumnya, maka UMKM merupakan suatu unit usaha yang bergerak disektor informal.

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi dalam memacu penyerapan tenaga kerja di Indonesia, karena sifat UMKM dekat dengan rakyat kecil. Hal ini sepenuhnya disadari oleh pemerintah, sehingga UMKM termasuk dalam salah satu fokus program pembangunan yang ditanamkan oleh pemerintah Indonesia. Penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM sangatlah besar yaitu lebih dari

90%. Dengan meningkatnya PDB Usaha Mikro dan Kecil diharapkan sekaligus dapat meningkatkan penggunaan tenaga kerja sehingga menumbuhkan pendapatan perkapita kelompok masyarakat rendah yang dapat menekankan kemiskinan.

UMKM pada umumnya menggunakan sumber daya lokal, maka tidak bergantung pada impor, serta produk yang dihasilkan dapat di ekspor oleh pelaku UMKM.

2.6 Hubungan Antar Variabel

2.6.1 Inflasi dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM

Inflasi yang terjadi pada perekonomian memiliki beberapa dampak yang diantaranya adalah inflasi menyebabkan perubahan output dan tenaga kerja. Dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitas inflasi terjadi. Perusahaan akan menambah jumlah output apabila masih terjadi inflasi ringan. Keinginan perusahaan menambah output tentu juga dibarengi penambahan faktor produksi seperti tenaga kerja. Dengan kondisi tersebut maka permintaan akan tenaga kerja akan meningkat yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan akan mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional.

2.6.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan adanya produktivitas pekerja yang meningkat adalah dua hal yang sangat diperlukan untuk membuka lapangan kerja baru dan mempertahankan para pekerja yang masih bekerja, dimana pertumbuhan ekonomi tersebut harus dipertahankan untuk optimalisasi partisipasi kerja bagi masyarakat. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neo klasik oleh solow-swan yang mengasumsikan bahwa negara-negara menggunakan sumber dayanya secara efisien dengan peningkatan modal, kemajuan teknologi dan tenaga kerja. Pada hakikatnya tingkat pertumbuhan dipengaruhi pada penambahan modal dan produktivitas modal

marginal, penambahan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja marginal, serta perkembangan teknologi.

Menurut penelitian Dharma (2015:69) “Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja”. Penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat jika terjadi perkembangan kemajuan teknologi. Dengan kata lain, jika modal fisik (investasi) suatu negara meningkat, maka pendapatan nasional akan meningkat sehingga dengan meningkatnya pendapatan nasional akan memberi kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja. Kemajuan teknologi juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan menyerap tenaga kerja karena mengoperasikan mesin dibutuhkan sumber daya manusia. Apabila semakin banyaknya para penganggur yang terserap dalam lapangan kerja maka semakin lama jumlah pengangguran akan semakin sedikit. Maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan semakin bertambah karena tersedianya lapangan pekerjaan yang baru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.6.3 Upah Minimum dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM

Apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-rata, maka akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, berarti akan terjadi pengangguran. Begitu juga sebaliknya dengan turunnya tingkat upah rata-rata akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga perunit barang yang diproduksi.

Menurut Pramudita (2015:2) menyatakan bahwa: “semakin banyak usaha yang berkembang atau berdiri di Indonesia maka akan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak pula, dan ketika tingkat upah makin tinggi maka tenaga kerja yang diminta berkurang. Hal tersebut dilakukan industri untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh industri tersebut”.

Teori Neo Klasik menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah disini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut terhadap pengusaha. Upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja (produktivitas) yang diberikan oleh tenaga kerja, artinya pada teori ini dapat diketahui bahwa teori Neo Klasik didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil faktor produksi. Dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari karyawannya. Teori Neo Klasik memperkirakan bahwa upah cukup fleksibel di pasar tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja dan tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran. Artinya pada tingkat upah riil semua orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut, maka akan memperoleh suatu pekerjaan. Karena pada dasarnya mereka yang menganggur, hanyalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku, jadi mereka ini adalah penganggur yang sukarela.

2.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Buulolo (2020: 65) dalam skripsi dengan judul: “Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Nilai Ekspor, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM di Indonesia Pada Tahun 1998-2018”

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia tahun 1998-2018, menemukan bahwa:

(1) jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia tahun 1998-2018, (2) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia tahun 1998-2018.

2. Penelitian Widdyantoro (2013:89) dalam skripsi dengan judul: “Pengaruh PDB, Investasi, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia periode 2000-2011.”

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil estimasi variabel PDB UKM dan variabel Jumlah Unit Usaha UKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja usaha kecil dan menengah. Sedangkan, variabel Investasi UKM berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja usaha kecil dan menengah.

3. Penelitian Luthfiah (2017:76) dengan judul: “Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Investasi, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Jawa Barat Periode 2012-2015”

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia periode 2012-2015, menemukan bahwa:

(1) jumlah unit usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2012-2015, (2) upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2012-2015.

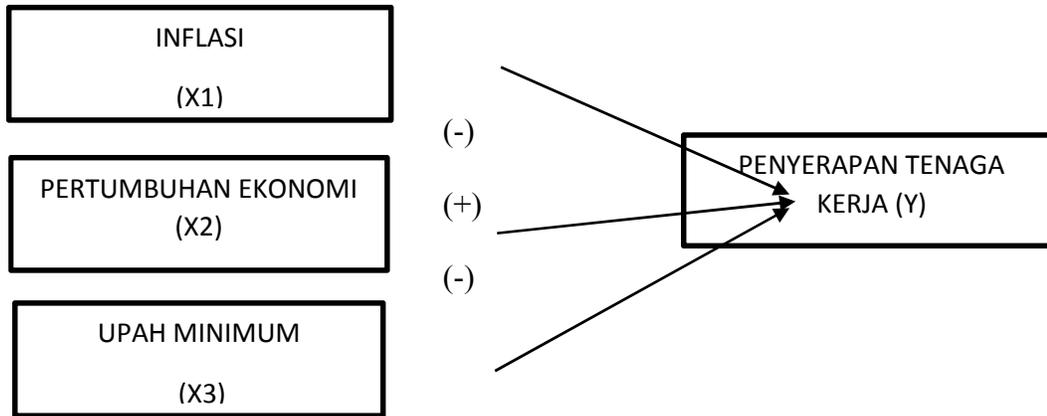
4. Penelitian anamathofani (2019:20) dengan judul: Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di kota Malang, menemukan bahwa: Inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Malang.

2.8 Kerangka Konseptual

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar dapat mencapai lapangan kerja penuh (*full employment*) tentu diperlukan langkah-langkah strategis. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM, karena sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan mendorong peningkatan investasi. Agar upaya tersebut lebih efektif, maka perlu adanya suatu kajian mengenai perkembangan sektor UMKM di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan tidak hanya sebagai sumber penting bagi peningkatan kesempatan kerja, tetapi juga dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekspor di Indonesia.

Kondisi UMKM di Indonesia menurut data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM, mulai menunjukkan adanya pertumbuhan baik dari segi jumlah usaha, investasi, maupun kontribusinya terhadap PDB. Pengembangan UMKM dilandasi beberapa hal, salah satunya yaitu UMKM banyak menyerap tenaga kerja sehingga pelaku UMKM dapat menggunakan sumber daya alam lokal yang pada akhirnya dengan pertumbuhan UMKM tersebut akan memberi dampak positif terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan distribusi pendapatan dan peningkatan pembangunan ekonomi. Untuk

menyederhanakan alur pemikiran tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Penulis akan meneliti pengaruh dari inflasi (X1), pertumbuhan ekonomi (X2), dan upah minimum (X3) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM sebagai variabel (Y) tahun 2005-2020.

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang harus di uji kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisisnya. Dari kerangka konseptual yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia tahun 2005-2020.
2. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia tahun 2005-2020.

3. Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia tahun 2005-2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menganalisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia setiap tahun 2005-2020.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2005-2020 yaitu dalam bentuk angka yang diambil dalam runtut waktu (*time series*) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan kajian data dengan memanfaatkan buku, makalah ilmiah, jurnal, tesis, data internet dan data dokumenter lainnya yang relevan dengan penelitian terkait karena pengumpulan data yang digunakan untuk landasan teori yang kokoh dibangun di atas argumen pemecahan masalah.

3.4 Model Analisis Data

Model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia tahun 2005-2020 adalah model ekonometrik.

Penggunaan model ekonometrik dalam analisis struktural dimaksudkan untuk mengukur besaran kuantitatif hubungan variabel-variabel ekonomi. Analisis struktural bertujuan mengalami ukuran kuantitatif, pengujian dan validasi hubungan variabel-variabel ekonomi. Model ekonometrik yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda tersebut, adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_i ; i = 1, 2, 3, \dots, n$$

Dimana:

Y = Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM di Indonesia (Jiwa)

- X_1 = Inflasi (Persen)
- X_2 = Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
- X_3 = Upah Minimum Rata-rata Provinsi (Rupiah)
- α = Intersep
- $1, 2, 3$ = Koefisien Regresi (Statistik)
- ε_i = Galat (Error Term)

3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Uji Secara Individu (Uji t)

Uji individual atau uji-t dimaksud untuk mempelajari apakah variabel bebas (inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (penyerapan tenaga kerja sektor UMKM).

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{\hat{S}_i - S_i}{S(\hat{S}_i)} : i = 1, 2, 3$$

Dimana:

\hat{S}_i : Koefisien Regresi

S_i : Parameter

$S(\hat{S}_i)$: Simpangan Baku

Hipotesis yang digunakan:

1. Inflasi (X_1)

$H_0 : \beta_1 = 0$, Artinya inflasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia.

$H_1 : \beta_1 > 0$, Artinya ada pengaruh negatif dan signifikan antara inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia.

2. Pertumbuhan Ekonomi (X2)

$H_0 : \beta_2 = 0$, Artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia.

$H_1 : \beta_2 > 0$, Artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia.

3. Upah Minimum (X3)

$H_0 : \beta_3 = 0 \Rightarrow$ Artinya upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia.

$H_1 : \beta_3 < 0 \Rightarrow$ Artinya upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia.

Regresi koefisien digunakan untuk memahami kepentingan relatif variabel independen dan dependen. Uji dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan ambang batas yang signifikan. Jika tingkat probabilitasnya cukup tinggi, variabel koefisien yang dimaksud juga akan berpengaruh signifikan terhadap variabel lainnya. pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *probability* dengan taraf signifikan. Apabila nilai $probability < \alpha$ maka koefisien variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada drajat keyakinan 95% atau atau 5% = 0,05 dengan prinsip sebagai berikut:

1. Jika nilai $probability$ t-statistik $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_1 diterima.
2. Jika nilai $probability$ t-statistik $> 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak.

3.5.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji “F” digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terkait yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas secara serempak (secara simultan atau secara bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut:

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR (k - 1)}{JKG (n - k)}$$

Dimana:

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Adapun kriteria pengujian digunakan sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. H_1 : tidak semua $\beta_i = 0$, $i = 1,2,3$ berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika probabilitas (signifikan) $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_1 diterima.
2. Jika probabilitas (signifikan) $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima H_1 ditolak.

3.6 Uji Keباikan Suai : Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Keباikan Suai (R^2) bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel terikat dengan variabel tidak terikat. Untuk melihat keباikan-suai model yang digunakan koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$: R^2 artinya semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.

3.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.7.1 Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi berganda. Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi dikatakan baik bila tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas ini juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat diantara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Adapun pengaruhnya terhadap nilai taksiran antara lain:

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai $VIF \leq 10$ dan $Tol \geq 0,1$ maka dianggap tidak ada

pelanggaran multikolinieritas. Namun bila sebaliknya $VIF \geq 10$ dan $Tol \leq 0,1$ maka dianggap ada pelanggaran multikolinieritas.

3.7.2 Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan akan ada masalah autokorelasi dalam regresi. Autokorelasi ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi yaitu dengan uji:

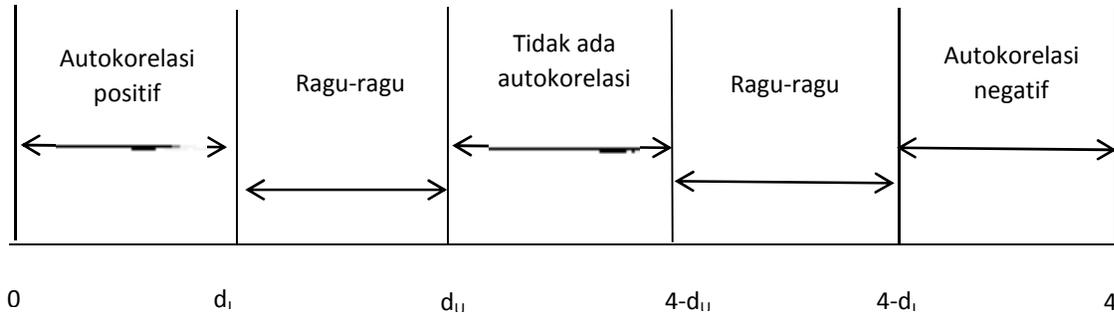
1. Uji Durbin-Watson (Uji DW)

Menurut Ghozali (2013:108) menyatakan bahwa Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*firstorder autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercep (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* diantara variabel independen. Uji Durbin Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis dL dan dU dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai α . Secara umum bisa diambil patokan:

1. $0 < d < dL$: Menolak Hipotesis 0 (terjadi gejala autokorelasi positif).
2. $dL \leq d \leq dU$: Daerah Keragu-raguan (tidak ada keputusan).
3. $dU < d < 4 - dU$: Gagal Menolak Hipotesis 0 (aman dari autokorelasi positif/negatif).
4. $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$: Daerah Keragu-raguan (tidak ada keputusan).

5. $4 - d_L < d < 4$: Menolak Hipotesis 0 (terjadi gejala autokorelasi negatif).



Gambar 3.1 Uji Durbin-Watson

Kriteria uji yang digunakan untuk melihat adanya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Jika d lebih dari d_L atau lebih besar dari $4-d_L$ maka tolak H_0 , artinya bahwa model persamaan yang digunakan pada penelitian terdapat autokorelasi.
2. Sebaliknya jika d lebih besar dari d_U atau lebih besar dari $4-d_U$ maka diterima H_0 , artinya bahwa model persamaan yang digunakan pada penelitian tidak terdapat autokorelasi.
3. Jika d terletak antara d_L dan d_U atau diantara $4-d_L$ dan $4-d_U$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

2. Uji run (run test)

Uji run digunakan untuk mengetahui apakah data galat terjadi secara acak. Jika antar galat (residu) tidak terdapat hubungan korelasi, maka dapat dikatakan bahwa galat acak atau random. Menurut Ghozali (2013:116) “run test digunakan untuk melihat apakah data galat residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)”. Cara yang digunakan dalam uji run sebagai berikut.

H_0 : galat (res_1) acak (random)

H_1 : galat (res_1) tidak acak

3.7.3 Normalitas

Sesuai pada teorema Gauss Markov:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \dots + \varepsilon_i$$

1. $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ Apakah galat (distribusi error) menyebar normal atau tidak
2. Tidak terjadi autokorelasi.

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS (*Ordinary Least Square*) adalah kenormalan. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t atau f mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Berikut cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis uji statistik.

❖ Analisis Statistik

Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau tidak hati-hati secara visual. Menurut Ghozali untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat menggunakan uji statistik lain yaitu Uji Statistik Nonparametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Data galat (residu) menyebar normal

H_1 : Data residu tidak menyebar normal

Dengan kriteria pengujian adalah:

1. Jika hasil dari nilai asymptotic sig < maka H_0 ditolak, H_1 diterima yang berarti residual tidak menyebar normal.

2. Jika hasil dari nilai asymptotic sig > maka H_0 diterima, H_1 ditolak yang berarti residual menyebar normal.

3.8 Definisi Operasional Variabel

1. Penyerapan Tenaga Kerja UMKM (Y)

Penyerapan Tenaga Kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Data dinyatakan dengan satuan jiwa per tahun.

2. Inflasi (X1)

Inflasi merupakan suatu peningkatan harga yang terjadi pada kurun waktu 2005-2020. Data inflasi diperoleh melalui data Badan Pusat Statistik dengan satuan (%) per tahun.

3. Pertumbuhan ekonomi (X2)

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional di Indonesia. Dalam hal ini satuan yang digunakan adalah persen per tahun.

4. Upah Minimum (X3)

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada karyawannya. Data yang digunakan adalah rata-rata upah minimum setiap provinsi di Indonesia tahun 2005-2020. Data diukur dengan satuan Rupiah per tahun.